



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/2155/VIII/2018

Bogor, 29 Agustus 2018

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Wawancara

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran

di

Tempat

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Unhan TA. 2017/2018.
2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis terkait dengan bidang program studinya;
 - b. Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Alfian Rizanurra Asikin, NIM: 120170303003, Nomor HP: 085797275822, email: alfian.rizanurra@kn.idu.ac.id, bermaksud memohon kepada Bapak untuk menjadi salah satu narasumber penelitian. Adapun judul tesis yang disusun adalah, "Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dalam Pencegahan Konflik di DKI Jakarta: Studi Kasus pada Pilgub DKI Jakarta 2017."
3. Mohon konfirmasi waktu dan pelaksanaan wawancara tersebut. *Contact Person*: HP. **085797275822** a.n. Alfian Rizanurra Asikin
4. Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

a.n. Rektor

Universitas Pertahanan

Warek I/Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

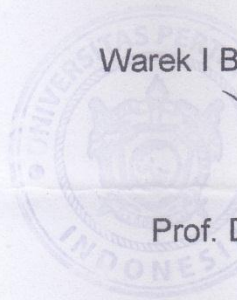
1. Menteri Pertahanan
2. Gubernur Bali
3. Pangdam IX Udayana
4. Kapolda Bali

Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : B/ 218/ VIII/2018
Tanggal : 31 Agustus 2018

DAFTAR PEJABAT

1. Deputi II Bidang Dalam Negeri BIN
2. Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya
3. Direktorat Binmas Polda Metro Jaya
4. Kasi Teritorial Kodam Jaya
5. Kakesbangpol Provinsi DKI Jakarta Bidang Kewaspadaan Nasional
6. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dadang Gunawan', is written over the official seal.

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik JL HR Rasuna Said Kav C 22 Telepon : 021-50810900

JAKARTA

Kode Pos : 12940

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
NOMOR : 616/AF.1/31/-1.862.9/2018

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014;
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian.
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 549 Tahun 2016 tentang Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing.
- Menimbang : a. Bahwa sesuai surat Warek I Bid Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pertanahan Nomor B/2181/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018;
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Izin Riset, Observasi, Wawancara, Studi Kepustakaan, Pendataan dan Sejenisnya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, berkas persyaratan administrasi surat izin penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, memberikan Surat Rekomendasi Izin Penelitian kepada :

1. Nama : Alfian Rizanurraza Asikin
2. No. KTP : 3209081807910005
3. Alamat : Dusun I RT 002/001 Kel Curug Kec Susukan Lebak, Kab Cirebon
4. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan Riset, Observasi, Wawancara, Studi Kepustakaan, Pendataan dan Sejenisnya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Judul Penelitian : Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Dalam Pencegahan Konflik di DKI Jakarta
- b. Tempat/Lokasi : Bakesbangpol DKI, Polda Metro, Kodam Jaya, KPUD Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta, Deputi II BIN RI
- c. Bidang Penelitian : Pertahanan
- d. Waktu : September s.d Desember 2018
- e. Nama Lembaga : Universitas Pertahanan

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
4. Surat Izin Penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Jakarta, 14 September 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Wakil,



Denny Wahyu Haryanto

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Staff Ahli Bawaslu, Bapak Andi Maulana, di Kantor Bawaslu DKI Jakarta. 17 Oktober 2018 (sumber: dokumentasi pribadi)



Wawancara dengan Kabid 1 Dirintelkam Polda Metro Jaya Bapak Akbp. Muheni di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, 18 Oktober 2018 (Sumber: Dokumen Pribadi)



Wawancara dengan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Ibu Betty Epsilon, di Kantor KPU provinsi DKI Jakarta., 22 Oktober 2018 (sumber: dokumentasi pribadi)



Contoh sidang pelanggaran Administrasi Pemilu, Kantor Bawaslu provinsi DKI Jakarta, 17 Oktober 2018 (sumber: dokumentasi pribadi)



Wawancara peneliti dengan Kasubdit Politik, Bapak Mazhar dan Tim posko bersama pilgub 2017, di Kantor Bakesbangpol DKI Jakarta, 24 September 2018 (Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Wawancara peneliti dengan Kasubdit Penanganan Konflik Sosial, Bapak Sony, Kantor Bakesbangpol DKI Jakarta, 24 September 2018 (Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Koordinasi pos komando bersama pilgub 2017 (Sumber: Dokumentasi Bakesbangpol)



Koordinasi pos komando bersama pilgub 2017 (Sumber: Dokumentasi Bakesbangpol)

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Apakah kesbangpol rutin melakukan program pemetaan daerah konflik di DKI Jakarta?
2. Daerah mana saja yang sering masuk dalam pemetaan konflik di DKI Jakarta?
3. Apakah konflik yang terjadi di daerah tersebut dipengaruhi oleh sejarah, kondisi sosial atau ekonomi masyarakat?
4. Apakah daerah yang masuk dalam pemetaan daerah konflik memiliki sejarah konflik sebelumnya?
5. Bagaimana eskalasi konflik berupa ketegangan dan kekerasan yang bernuansa politik di DKI Jakarta pada tahun 2017?
6. Apa saja alat atau mekanisme yang berlangsung dalam menangani konflik pada Pilkada di DKI Jakarta?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik di DKI Jakarta pada tahun 2017?
8. Bagaimana sistem penopang perdamaian atau kapasitas mengelola konflik di DKI Jakarta tahun 2017? Misalnya aturan mengenai pengelolaan hubungan antara agama dan kelompok, budaya toleransi, gotong royong, dan sebagainya.
9. Upaya apa saja yang digunakan oleh kesbangpol untuk mendapatkan informasi terkait konflik tahun 2017?
10. Sebelum terjadinya konflik, apakah kesbangpol mengirimkan anggota untuk menganalisis kondisi yang terjadi di lapangan?
11. Apakah kesbangpol melakukan *lobby* baik individual maupun kelompok kepada pihak-pihak yang bersengketa?
12. Apakah kesbangpol mengundang anggota jaringan dan atau stakeholder lainnya untuk mendiskusikan bersama tentang konflik yang terjadi dan bagaimana rencana tindak lanjut?
13. Bagaimana usaha kesbangpol untuk mengcounter isu/informasi yang bersifat provokatif?
14. Dalam pencegahan penyebaran konflik ke wilayah lain, apakah kesbangpol memberdayakan masyarakat untuk pencegahan tersebut? Atau adakah upaya lain yang di tempuh?
15. Konflik pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 apakah terjadi ketimpangan akses pemenuhan hidup yang dirasa tidak adil oleh masyarakat?
16. Apakah ada stereotip dan prasangka buruk yang dimiliki masyarakat terhadap perbedaan etnis, sosial dan agama yang ada di DKI Jakarta?

17. Bagaimana hubungan antara kurangnya informasi, perbedaan pandangan, salah komunikasi, perbedaan interpretasi antar masyarakat yang berbeda etnis dan agama dengan konflik yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017?
18. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh kesbangpol untuk mengatasi ketegangan dan mobilisasi massa, kontradiksi antar pihak-pihak yang berkepentingan serta penghentian kekerasan ketika terjadi konflik Pilkada di DKI Jakarta tahun 2017?
19. Bagaimana upaya kesbangpol dalam menciptakan perdamaian dan menurunkan eskalasi ketika terjadinya konflik pada Pilkada di DKI?
20. Dari keseluruhan konflik pada Pilkada di DKI Jakarta tahun 2017, apakah yang menjadi akar penyebab terjadinya konflik?
21. Apakah selama terjadinya konflik terjadi kekerasan dan korban jiwa selama terjadinya konflik?
22. Bagaimana keadaan sosial masyarakat sebelum terjadinya konflik di Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017?
23. Apa yang menjadi faktor pemicu konflik pada Pilkada di DKI Jakarta tahun 2017? ?Jakarta pada tahun 2017?
24. Selama terjadinya konflik pada Pilkada di DKI Jakarta tahun 2017, siapakah yang menjadi provokator terjadinya konflik?
25. Selama terjadinya konflik pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017, siapakah yang menjadi kelompok rentan yang sering menjadi korban kekerasan dan mendapatkan intimidasi?
26. Dalam upaya deeskalasi konflik, siapa saja kelompok fungsional yang terlibat selama konflik berlangsung?
27. Siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam proses deeskalasi konflik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017?
28. Mekanisme apa yang dilakukan untuk menindak lanjuti konflik yang terjadi?
29. Apa faktor pendorong dan penghambat terciptanya perdamaian pasca konflik terjadi?
30. Bagaimana upaya pencegahan konflik yang dilakukan oleh kesbangpol DKI Jakarta?